

**TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI TUGAS
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP
PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**

TESIS

Oleh:

**Ferry Setiawan
202120251001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Tindak Pidana Menghalang - Halangi Tugas
Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Penerapan
Sanksi Pidana Dalam Perspektif Keadilan

Tesis : Tindak Pidana Menghalang - Halangi Tugas
Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Penerapan
Sanksi Pidana Dalam Perspektif Keadilan

Nama Mahasiswa : Ferry Setiawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251001

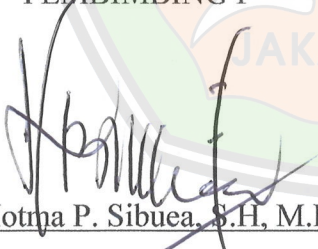
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum /
Hukum Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Mei 2023

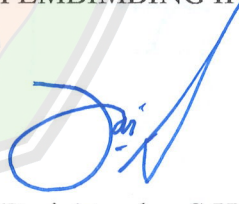
MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Hotma P. Sibuea, S.H, M.H

NIDN : 0323035802


Dr. Dwi Atmoko, S.H, MH

NIDN : 0316077604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Tindak Pidana Menghalang - Halangi Tugas
Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Penerapan
Sanksi Pidana Dalam Perspektif Keadilan.

Nama Mahasiswa : Ferry Setiawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251001

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Mei 2023

MENGESAHKAN,

Ketua : Prof Dr. M.S Tumanggor, S.H, M.Si.CTA (.....)

Tim Penguji NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H, M.H (.....)

NIDK. : 897370023

Penguji II : Dr. Yurnal S.H., M.Hum (.....)

NIDN. 0314125804

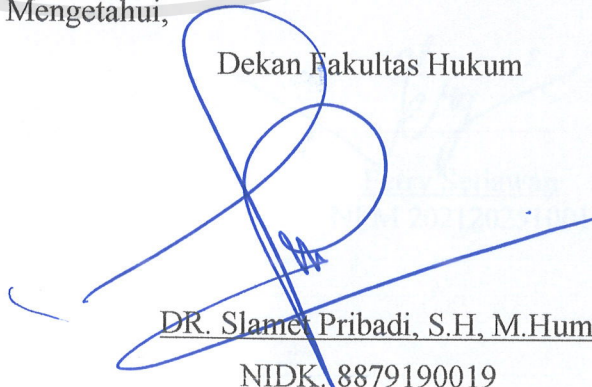
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Megister Ilmu Hukum



Dr. Lusiana Sulastri, SH.MH
NIDN. 0127117401

Dekan Fakultas Hukum



DR. Slamet Pribadi, S.H, M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul:

Tindak Pidana Menghalang-Halangi Tugas Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perspektif Keadilan.

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

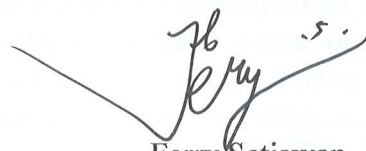
Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Ferry Setiawan
NPM 202120251001

ABSTRAK

Kebijakan dasar dalam hukum ketenagakerjaan adalah melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pekerja/buruh, dari kesewenang-wenangan majikan/pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial. Keberadaan pengawasan ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan pihak lemah, dalam melakukan dalam penegakan khusus pidana selama ini belum optimal dalam perspektik keadilan. Sanksi pidana ringan sehingga masih saja bentuk pelanggaran-pelanggaran dari perusahaan. Seperti perusahaan yang menghalang-halangi tugas pengawasan ketenagakerjaan seperti kasus PT. Hungseng Kreasindo Gravure Indonesia dan kasus PT. Siemens Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 2/Pid.C/2019/PN.Ck dan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg sanksi pidana tidak sesuai dengan rasa keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Teknik pengumpulan data sekunder dan Teknik analisa data dengan deskriptif analitis.

Hasil penelitian optimalisasi tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan dibedakan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Subjek yang diancam pidana terdiri atas pengawas ketenagakerjaan dan pengusaha. Penerapan sanksinya dilakukan secara alternatif, yaitu pelaku tindak pidana penjara saja, atau denda saja. Hal ini tidak dimungkinkan sanksi tersebut dijatuhkan saksi yang bersifat kumulatif dengan redaksi “pidana penjara dan/atau denda”, tetapi bersifat alternatif dengan redaksi “pidana penjara atau denda”, juga tidak menganut sanksi minimal dan sanksi maksimal khusus. Nominal hukuman kurungan selama -lamanya 3 bulan atau denda yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang tidak relevan untuk digunakan masa sekarang. Putusan tindak pidana ringan terhadap perusahaan dikhawatirkan tidak membuat efek jera bagi perusahaan, karena sistem pengenaan saksi pidana kurang memenuhi rasa keadilan yang bermartabat, karena memakai sistem alternatif (atau), yaitu saksi pidana ringan atau denda yang nominalnya sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang. Sehingga sanksi pidana ketenagakerjaan akan lebih bisa mewujudkan keadilan yang bermartabat apabila memakai sistem pidana penjara 1 tahun dan paling banyak 2 tahun dan nominal denda seperti nominal denda dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang besarnya paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengawasan Ketenagakerjaan, Asas Keadilan

Abstract

The basic policy in labor law is to protect the weak, in this case, the worker/laborer, from the arbitrariness of the employer/employer that can arise in a working relationship to provide legal protection and realize social justice. The existence of labor inspection is a form of protection for the weak, in carrying out special criminal enforcement so far it has not been optimal from the perspective of justice. Mild criminal sanctions so that there are still forms of violations from the company. Like a company that obstructs the task of labor inspection, such as the case of PT. Hungseng Kreasindo Gravure Indonesia and the PT. Siemens Indonesia, based on the Decision of the Cikarang District Court Number: 2/Pid.C/2019/PN.Ck and the Decision of the Serang District Court Number: 4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg, criminal sanctions are not following a sense of justice. The research method used in this paper is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. Secondary data collection techniques and data analysis techniques with analytical descriptive.

The results of research on optimizing criminal acts in the field of employment in Law Number 3 of 1951 concerning Labor Inspection are distinguished in the form of crimes and violations. Subjects subject to criminal penalties consist of labor inspectors and employers. The application of sanctions is carried out alternatively, namely only imprisonment for criminal acts, or only fines. It is not possible for the witness to impose cumulative sanctions with the editorial "imprisonment and/or fines", but are alternative with the editorial "imprisonment or fines", nor do they adhere to specific minimum and maximum sanctions. The nominal penalty for imprisonment for a maximum of 3 months or the fine referred to in Article 6 paragraph (4) is only Rp. 500,- (five hundred rupiahs) which is irrelevant for today's use. It is feared that decisions for misdemeanor crimes against companies will not create a deterrent effect for companies, because the criminal witness imposition system does not fulfill a dignified sense of justice. After all, it uses an alternative system (or), namely minor criminal witnesses or fines whose nominal value is no longer relevant today. So that labor criminal sanctions will be more able to realize dignified justice if they use a prison sentence system of 1 year and a maximum of 2 years and a nominal fine such as the nominal fine in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the amount of which is at least Rp. 5,000,000.- (five million rupiah) and a maximum of Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah).

Keywords: *Criminal Acts, Labor Inspection, Principles of Justice*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul **Tindak Pidana Menghalang-Halangi Tugas Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perspektif Keadilan.** ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dan tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang berkenan memberikan informasi, masukan serta saran kepada penulis selama masa penulisan. Dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Drs. Irjen Pol. (P) Bambang Karsono, SH, MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Lusia Sulastri, SH, MH, , selaku Kaprodi S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Hotma P. Sibuea, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan Penguji II yang memberikan arahan penelitian dan semangat kepada Penulis.
5. Dr. Dwi Atmoko, S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan terselesainnya penelitian ini.
6. Prof. Dr. M.S Tumanggor, S.H, M.Si CTA, selaku Ketua Penguji yang memberikan arahan hingga sempurnanya penelitian ini.
7. Dr. Yurnal S.H., M.Hum, selaku Anggota Penguji I yang memberikan arahan hingga sempurnannya penelitian ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Seluruh Staf TU Magister Ilmu Hukum dan seluruh Staf Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

10.Rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2021.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna serta masih butuh pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan/atau saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu hukum dan dapat diterapkan di masyarakat.

Jakarta, Mei 2023

Ferry Setiawan NPM
202120251001



DAFTAR ISI

LEMBAR PEMBIMBINGAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Kerangka Pemikiran....	14
1.5. Metode Penelitian.....	22
1.6. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KEBIJAKAN TINDAK PIDANA	
BIDANG KETENAGAKERJAAN.....	30
2.1. Teori Negara Hukum.....	30
2.1.1 Pengertian Negara Hukum.....	30
2.1.2 Prinsip-Prinsip Negara Hukum.....	32
2.1.3 Unsur-Unsur Negara Hukum.....	33
2.2. Konsep Hukum Ketenagakerjaan.....	35
2.2.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	35
2.2.2 Sumber Hukum Ketenagakerjaan.....	38
2.2.3 Pihak-Pihak Dalam Hukum Ketenagakerjaan.....	42

2.3	Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Pegawai	
	Pengawas Ketenagakerjaan.....	47
2.3.1	Pengertian Pengawasan Ketenagakerjaan.....	47
2.3.2	Peraturan Terkait Tugas Pengawasan.....	52
2.3.3	Macam-macam Pengawasan.....	55
2.3.4	Fungsi Pemerintah dalam Hubungan Industrial.....	56
2.4	Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan Dalam	
	Peraturan Perundang undangan di Indonesia.....	58
2.4.1	Hukum Pidana dan Karakteristiknya.....	58
2.4.2	Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan Menurut UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja....	65
2.4.3	Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan Menurut UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan Di Perusahaan.....	66
BAB III TINDAK PIDANA MENGAHALANG-HALANGI		
	PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.....	68
3.1	Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 2/Pid.C/2019/PN.Ckr.....	68
3.2	Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg.....	73
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI		
	TUGAS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN.....	78
4.1	Optimalisasi sanksi pidana terhadap perusahaan yang menghalang halangi tugas pengawas ketenagakerjaan.....	78
	1. Pengaturan Pengawasan Ketenagakerjaan.....	78
	2. Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan.....	83

3. Mengoptimalkan sanksi pidana ketenagakerjaan oleh

Pegawai Pengawas Pengawas Ketenagakerjaan..... 90

4.2 Pengenaan sanksi pidana menghalang-halangi tugas pengawas ketenagakerjaan dalam putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 2/Pid.C/2019/PN.Ckr dan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg sudah sesuai dengan asas keadilan.....109

BAB V PENUTUP.....123

5.1. Kesimpulan..... 123

5.2. Saran..... 124

